

# MEMAHAMI AKAR DAN RESOLUSI KONFLIK

Oleh : Christian Tindjabate<sup>\*)</sup>

## PENDAHULUAN

Memahami konflik serta akar persoalannya, merupakan hal yang sangat penting, untuk tiba pada tahapan analisis guna resolusi konflik. Pekerjaan ini terus-terang tidak mudah dilakukan sebab seringkali meskipun faktor penyebab suatu konflik awalnya bersifat tunggal, namun dalam perkembangan selanjutnya acap kali faktor-faktor lain pun turut pula terseret ke dalamnya sehingga menjadikannya berdimensi banyak. Dalam kaitan ini secara sederhana dapat diibaratkan bagaikan sebuah kue onde-onde yang ketika diletakkan di atas sebuah nampan yang berisi kelapa parutan, maka yang tampak pada permulaan hanyalah satu bagian saja dari permukaan bulatan kue onde-onde tadi yang dilengketi oleh kelapa parutan. Namun ketika nampan yang berisi kelapa parutan tersebut digoyang atau terus diaduk dengan cepat, maka lama-kelamaan kue onde-onde tersebut akan menggelinding ke seluruh sudut ruang di atas

nampan tersebut dan melengketi sebanyak mungkin kelapa parutan yang tersedia, sehingga akhirnya onde-onde tersebut akan tertutupi sehingga tidak menampakkan lagi wujud aslinya. Pesan yang ingin dikemukakan dari contoh sederhana di atas adalah, bahwa semakin kuat upaya-upaya provokasi oleh kelompok-kelompok tertentu terhadap suatu konflik yang tadinya penyebabnya hanya bersifat tunggal, maka lama-kelamaan konflik tersebut akan berkembang menjadi multi aspek yang pada gilirannya dapat menjadi katalisator intensitas konflik dalam masyarakat yang tidak mudah untuk diatasi. Itulah realitas konflik yang terjadi di tanah air kita seperti; di Ambon, dan Poso, yang penyebab awalnya hanyalah soal sepele atau tunggal, yaitu yang satu soal pembayaran ongkos kendaraan di sebuah terminal, dan yang satunya lagi soal pertengkaran di kalangan anak muda. Namun karena semakin digoyang atau diaduk-aduk, akhirnya meng-

<sup>\*)</sup> Staf Pengajar Pasca Sarjana dan Ketua Lab. Sosiologi FISIP Untad, Palu.

gelinding ke persoalan-persoalan lain seperti persoalan politik, ekonomi, sosial budaya (etnis), dan akhirnya menyentuh persoalan yang paling sensitif yakni agama. Selanjutnya ketika semuanya telah menyatu, maka konflik sosial tersebut semakin pelik untuk diatasi. Konflik yang terjadi seperti itu penanganannya tentu membutuhkan banyak biaya dan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan serta harus didukung pula oleh partisipasi masyarakat, terutama yang memiliki kemampuan profesional menerapkan berbagai pendekatan teoretik dalam penanganan konflik yang relevan dengan kondisi-kondisi masyarakat yang dilanda konflik.

Tulisan singkat ini akan menguraikan secara berturut-turut tentang definisi konflik berikut kajian tentang faktor-faktor penyebab konflik dalam masyarakat, disusul kemudian oleh pembahasan mengenai perkembangan yang melatarbelakangi munculnya pendekatan resolusi konflik serta bagaimana pendapat para ahli terhadap pendekatan resolusi konflik tersebut. Selanjutnya, sebelum tiba pada bagian penutup, suatu uraian yang serba singkat pula akan dikemukakan tentang upaya-upaya

mengeliminir konflik sosial dalam masyarakat.

## MENDEFINISIKAN KONFLIK

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka (1997) memberikan pengertian konflik dari beberapa perspektif. dari perspektif kesusasteraan, konflik adalah ketegangan atau pertentangan antara kekuatan dua tokoh. Sementara dari perspektif psikologis, konflik adalah pertentangan dari dua atau lebih gagasan atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai sehingga mempengaruhi tingkah laku. Secara antropologis, konflik adalah persaingan antara dua masyarakat sosial yang mempunyai kebudayaan hampir sama. Dan secara sosial, konflik adalah pertentangan masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

Dari definisi-definisi tersebut, semuanya menunjuk pada suatu kondisi adanya percekocokkan, perselisihan dan pertentangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan perwujudan dari adanya pertentangan dua hal atau lebih yang berbeda. Atau dengan perkataan lain dapat pula disebut bahwa konflik merupakan

manifestasi lebih lanjut dari adanya ketidaksamaan.

## KONSEPTUALISASI TEORETIK PENYEBAB KONFLIK

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat dipenuhi dengan berbagai konflik, konflik antar-pribadi, antar-kelompok, bahkan antar-bangsa adalah merupakan bagian dari peradaban manusia yang muncul sebagai konsekuensi dari adanya interaksi sosial.

Secara kodrati manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang memiliki 2 sifat fundamental yang saling melengkapi yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai *makhluk individu*, manusia memiliki hak-hak individual untuk menentukan jalan hidupnya sendiri melalui cita-cita atau keinginan secara bebas. Sedangkan sebagai *makhluk sosial*, mengisyaratkan keterikatannya dengan orang lain, sehingga setiap manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini berarti setiap manusia mau tidak mau harus melakukan interaksi dengan orang lain dalam rangka bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya serta mengatur kehidupan bersama.

Dengan demikian dilihat dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial, betapa pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Sebab dengan interaksi sosial, maka akan berlangsung sebuah kehidupan yang berkembang secara dinamis, karena setiap orang dapat bekerjasama satu dengan yang lain dalam segala aspek kehidupan pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, kebudayaan kesenian, olahraga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, betapa pentingnya diupayakan agar ruang-ruang interaksi sosial dalam masyarakat bisa tercipta seluas-luasnya, agar melalui interaksi sosial yang dinamis manusia dapat mengatur kehidupan bersama menuju keadaan yang lebih baik. Sebaliknya tanpa interaksi sosial kehidupan manusia menjadi statis dan hidup itu sendiri kehilangan maknanya.

Namun demikian, meskipun interaksi sosial sebagai inti dari kehidupan manusia, akan tetapi tidak selamanya ia akan membawa sebuah hubungan yang harmonis dalam masyarakat, karena acap kali juga akan membawa pertentangan atau konflik di antara sesama anggota masyarakat individu, atau kelompok. Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini maka mau tidak mau kita harus memahami filosofis tentang manusia itu sendiri.

Seperti diketahui, manusia pada dasarnya diciptakan Tuhan dengan 2 sifat yang antagonistik. Perbuatan-perbuatan baik yang ditunjukkan oleh manusia adalah salah satu watak manusia karena dituntun oleh akal yang diberikan Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Sebaliknya manusia juga dikaruniai Tuhan sifat-sifat buruk seperti, sifat iri, dengki, ambisius, dan egoistis. Sifat-sifat atau watak manusia semacam ini, seringkali akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya dalam kehidupan interaksi sosial. Oleh karena itu, para filosof ternama seperti, **Immanuel Kant** misalnya, menggambarkan sosok pribadi manusia sebagai berikut :

*“Manusia merupakan gumpalan pertentangan-pertentangan. Manusia merupakan bagian dari alam, dan dengan demikian memiliki kecenderungan-kecenderungan naluri, seperti ambisi, ingin memiliki, dan ingin berkuasa. Naluri-naluri ini mendorongnya juga untuk hidup bersama dengan orang lain, karena hanya di dalam hubungan-hubungan kemasyarakatanlah ia dapat mewujudkan naluri-naluri itu. Tetapi pada saat yang sama ia dapat membahayakan masyarakat itu dengan mengikuti naluri-nalurnya”.*

Pada bagian lain **Thomas Hobbes** juga melihat bahwa sumber konflik dan kekerasan bersumber di dalam keadaan alamiah manusia sebagai sosok serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*), kemudian **Rousseau** yang berpandangan bahwa sumber konflik dan kekerasan tersembunyi di dalam rantai peradaban manusia yang membentuknya sebagai binatang yang saling menyerang sesamanya.

Demikianlah pandangan filosofis para ahli di atas tentang sumber penyebab konflik dan kekerasan yang bersifat internal dari sifat-sifat manusia itu sendiri. Sementara itu, para ahli yang lain tidak berhenti sampai di situ saja untuk memahami penyebab suatu konflik dalam masyarakat. Mereka kemudian berusaha memperluas analisis terhadap faktor penyebab konflik pada tataran eksternal seperti faktor-faktor kelas-kelas sosial, kekuasaan, politik, dan faktor-faktor sosial kultural lainnya.

Pertama-tama adalah **Karl Marx** (1983), yang berpendapat bahwa konflik dalam masyarakat bersumber dari adanya pertentangan antara dua kelas masyarakat yang memiliki akses ekonomi dan alat-alat produksi yang berbeda, yakni kaum kapitalis (pemilik modal) dan kaum proletar (buruh) yang tidak memiliki modal.

Hubungan antar-kedua kelas ini ditandai oleh adanya penghisapan atau eksploitasi pemilik modal terhadap kaum buruh. Tindakan ini selain telah melahirkan perasaan teralienasi di kalangan kaum buruh, juga menyebabkan kehidupan kaum buruh yang serba miskin. Faktor inilah yang di kemudian hari memicu konflik antar-kaum buruh dan pemilik modal.

Selain itu, Max Weber (1983), juga berpendapat bahwa sumber konflik dalam suatu masyarakat adalah berasal dari adanya pertentangan-pertentangan kepentingan manusia yang tidak saja bersifat material tetapi juga kepentingan ideal. Kepentingan ideal ini berkenaan dengan status, dan kekuasaan yang diperebutkan oleh setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam upaya untuk memperoleh status dan kekuasaan tersebut, maka pihak-pihak yang terlibat di dalamnya akan saling memojokkan dan bahkan saling menghancurkan satu sama lain. Pendapat Weber tersebut kemudian dikembangkan lebih luas lagi oleh Ralf Dahrendorf (1986) dengan perhatian utamanya pada otoritas kekuasaan dan wewenang yang dikatakannya menjadi sumber konflik yang utama, karena senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap

struktur. Lebih lanjut dikatakan, oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai, maka dalam masyarakat selalu terdapat 2 golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan kepentingan ini menurut Dahrendorf selalu ada setiap waktu dalam setiap struktur. Karena itu kekuasaan yang sah selalu dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti status quo.

Lebih lanjut Dahrendorf, membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas 2 tipe. Kelompok semu (*kuasai group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok yang kedua, yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.

Dalam pada itu, Ted Robert Gurr (1970) mengemukakan pendapatnya bahwa secara *psychologis* dalam masyarakat akan timbul konflik, manakala muncul suatu situasi yang disebut sebagai *relative deprivations*. Secara teoretik, *relative deprivations* menunjuk pada suatu kondisi kesenjangan antara “nilai yang diharapkan” dan “nilai kapabilitas” untuk menggapai harapan yang diinginkan. Pada saat terjadinya kondisi seperti ini, maka masyarakat yang bersangkutan akan mengalami kekecewaan atau frustrasi yang pada gilirannya dapat memunculkan tindakan melawan atau memberontak. Semakin besar kesenjangan yang terjadi, semakin besar pula peluang munculnya tindakan melawan atau konflik dalam masyarakat.

Demikian juga secara politis, Samuel Huntington (1968) dengan konsep teori “*gap hypothesis*” mengatakan bahwa apabila sistem politik suatu negara tidak mampu menampung dan menyalurkan semakin besar partisipasi yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses politik, maka sebagai akibatnya dalam masyarakat akan timbul pertentangan-pertentangan atau konflik yang sulit teratasi dan bahkan mungkin tidak akan teratasi sama sekali. Kemudian secara kultural, Clifford Gertz (1976) meng-

analisis faktor-faktor penyebab konflik dari aspek sosio kultural yang disebutnya sebagai “*konflik primordial*”. Menurut Gertz, konflik primordial muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya sikap-sikap eksklusivisme oleh suatu kelompok masyarakat yang didasari oleh penonjolan-penonjolan persamaan identitas seperti hubungan darah, daerah asal, etnis, dan agama. Jenis konflik seperti ini sering muncul ketika suatu masyarakat baru saja terlepas dari hegemoni atau penjajahan oleh suatu komunitas masyarakat yang lain. Biasanya didahului oleh terjadinya perubahan dalam sistem politik suatu negara. Persis seperti yang terjadi di Indonesia ketika Pemerintahan Orde Baru berakhir dan digantikan oleh tatanan pemerintahan reformasi yang kemudian melahirkan sistem pemerintahan otonomi daerah, segera diikuti oleh tuntutan masyarakat lokal (asli) di beberapa daerah untuk mengambil peran yang lebih besar dalam penyelenggara pemerintahan di daerahnya. Isu mengenai putera daerah yang harus memimpin daerahnya (Gubernur, Bupati, Walikota, Camat) serta jabatan-jabatan strategis lainnya dalam pemerintahan, menunjukkan dengan jelas adanya situasi yang dapat memicu terjadi-

nya konflik primordial antar-komunitas masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Gertz. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya untuk disimak adalah penyebab konflik yang disebabkan oleh negara. Dalam berbagai kasus tentang konflik yang terjadi di kalangan masyarakat petani misalnya, berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh James C Scott (1989), Eric Wolf (1969), dan Paige (1975), menunjukkan secara jelas bahwa adanya persekongkolan antara kaum kapitalis dan negara, telah mengakibatkan terjadinya perampasan aset-aset ekonomi petani seperti tanah oleh kaum kapitalis yang dibeking oleh negara. Akibatnya, memicu konflik vertikal antara petani dan negara. Melalui konflik tersebut, para petani tidak saja menuntut diperlakukannya keadilan bagi mereka, namun juga berupaya mengambil alih kembali hak-hak mereka atas tanah yang telah dirampas oleh kaum kapitalis.

Terjadinya konflik yang disebabkan oleh negara seperti dikemukakan di atas, jelas merupakan sebuah ironi. Sebab, negara yang seharusnya sebagai institusi yang diharapkan mensejahterakan seluruh rakyatnya, ternyata menjadi sumber konflik karena kebijakannya kepada sekelompok masyarakat tertentu. Dalam

konteks ini sebagaimana dikemukakan oleh Johan Galtung dengan konsep "violence state" yakni kekerasan yang disponsori oleh negara, maka negara dapat dituntut secara hukum apabila menjadi penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat, atau apabila secara nyata-nyata membiarkan terjadinya konflik dalam suatu masyarakat.

Masih banyak lagi argumentasi teorisasi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai penyebab timbulnya konflik dalam masyarakat yang tidak mungkin dimuat dalam ruang yang terbatas ini. Namun dengan mengedepankan beberapa perspektif di atas, diharapkan agar diperoleh gambaran bahwa akar penyebab konflik bersifat *multidimensional*. Sehingga dengan begitu, diperlukan kehati-hatian untuk mencermati setiap penyebab terjadinya konflik, agar penyelesaiannya pun menyentuh akar permasalahannya.

## MUNCULNYA RESOLUSI KONFLIK

Pada tahun 1950-an dan tahun 60-an ketika perang dingin antara negara-negara super power sedang memuncak yang ditandai oleh persaingan dan perlombaan senjata nuklir, masyarakat dunia mengalami ketakutan luar biasa bila konflik bersenjata itu benar-benar

terjadi. Karena itu, mendorong badan-badan internasional yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan upaya penyelesaian konflik super power antar-negara adikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Setelah berakhirnya perang dingin seiring dengan runtuhnya rezim komunis di Soviet, iklim resolusi konflik berubah secara radikal. Konflik internasional berubah menjadi konflik regional di beberapa daerah seperti; di Afrika Selatan, Amerika Tengah, dan Asia Timur. Dengan demikian upaya resolusi konflik mulai mengambil peran semakin intensif di daerah-daerah konflik tersebut, dengan melibatkan para relawan yang tergabung dalam berbagai organisasi non pemerintah (LSM). Organisasi-organisasi non pemerintah yang dipimpin oleh Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, Mantan Menlu Uni Soviet Edward Shevardnadze dan Yulius Nyerere, adalah di antara sekian banyaknya organisasi-organisasi relawan non pemerintah yang bekerja untuk resolusi konflik di negara-negara yang dilanda konflik.

Dengan demikian, konflik pada akhirnya menjadi fenomena umum yang terjadi tidak saja secara

hubungan internasional, tetapi juga politik dalam negeri, hubungan industri, komunitas keluarga, suku, antar-individu dan lain sebagainya. Dan di sinilah disiplin resolusi konflik semakin diterima dan menarik minat masyarakat untuk dikembangkan dengan berbagai pendekatan mulai dari negosiasi, dan mediasi sampai dengan permainan eksperimental.

### KONTROVERSI PANDANGAN TENTANG RESOLUSI KONFLIK

Meskipun resolusi konflik sebagai disiplin yang keberadaannya dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, namun di kalangan para ahli masih ditemukan pandangan skeptis terhadap upaya resolusi konflik. Para ahli yang beraliran realisme politik misalnya, tidak percaya bahwa upaya resolusi konflik benar-benar akan berhasil menciptakan suatu perdamaian dalam masyarakat. Bagi mereka, politik adalah perjuangan antar-kelompok antagonis dan kelompok yang tidak dapat bersatu, di mana kekuatan dan pemaksaan adalah satu-satunya sarana yang mereka gunakan. Pendeknya, mereka menganut faham "*civics pacem parra bellum*" yaitu bahwa perdamaian



yang lebih bertahan lama seringkali dihasilkan dari kemenangan secara penggunaan kekuatan kekerasan dan militer dibandingkan dengan negosiasi damai. Sementara intervensi pihak ketiga dianggap hanya akan memperpanjang penderitaan orang-orang yang berkonflik. Demikian pula pandangan kaum Neo-Marxis beranggapan bahwa seluruh usaha resolusi konflik sebagai sesuatu pandangan yang keliru, karena resolusi konflik berusaha mendamaikan benturan kepentingan yang sebenarnya tidak dapat direkomendasikan, gagal menyelesaikan pertikaian yang tidak seimbang dan tidak adil, serta tidak adanya analisis yang memadai dalam sebuah perspektif kekuatan global yang mengeksploitasi dan menindas.

Dengan demikian pendapat para ahli di atas hendak menegaskan bahwa upaya resolusi konflik yang dilakukan tidak akan mampu untuk melenyapkan konflik tersebut, dan bahkan mereka beranggapan bahwa konflik adalah sebuah motor penggerak perubahan dalam masyarakat yang mendinamiskan kehidupan masyarakat itu sendiri. Anggapan semacam ini, identik dengan kaum fungsionalis yang juga berpendapat bahwa dalam batas-batas tertentu

konflik memang dibutuhkan karena memiliki fungsi di dalam masyarakat. Konflik bagi mereka dapat menggiatkan masyarakat untuk memperbaiki sistem-sistem kehidupan yang ada sehingga kehidupan sosial akan lebih baik dari sebelumnya, berupa terciptanya keseimbangan (*equilibrium*) antar unsur-unsur dalam masyarakat.

### MENGATASI KONFLIK ✓

Konflik adalah sebuah realitas sosial yang keberadaannya seusia dengan peradaban manusia itu sendiri, dan tidak mungkin dapat diiadakan sama sekali dari hadapan umat manusia, selama manusia masih melakukan interaksi. Sementara itu, jika disimak faktor-faktor penyebab yang menyulut terjadinya konflik ternyata sangat beragam, sehingga tidak ada satu resep tunggal yang mampu menyelesaikan suatu konflik dalam masyarakat, kecuali diperlukan metode penyelesaian yang bersifat komprehensif.

✓ Adapun upaya untuk mengatasi konflik mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Pencegahan Konflik. Bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.

- b. Pengelolaan Konflik. Bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang berkonflik.
- c. Penyelesaian Konflik. Bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian.
- d. Resolusi Konflik. Bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bertikai/bermusuhan.
- e. Transformasi Konflik. Bertujuan untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

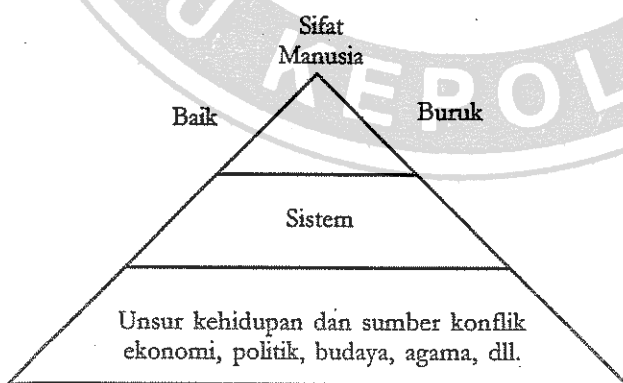
Upaya-upaya tersebut di atas, dilakukan dalam rangka menghadapi suatu konflik yang sudah terlanjur muncul dalam masyarakat. Sedangkan menurut hemat penulis perlu dilakukan suatu upaya yang bersifat substansial untuk mengeleminir sedemikian rupa faktor-faktor yang mendorong munculnya konflik ke permukaan yang sifatnya elementer yakni yang bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri, melalui suatu pen-

dekatan sistem. Adapun hakikat dari pendekatan sistem ini menurut hemat penulis, karena sistem adalah sebuah proses antara *input* dan *out put* yang dapat melakukan perubahan-perubahan yang bersifat positif, jika sistem yang ada baik adanya. Sebagai ilustrasi, tubuh kita adalah sebuah wadah yang di dalamnya kita membangun sebuah sistem. Kalau sistem yang terbangun dalam diri/tubuh kita baik, maka segala input-input yang masuk ke dalam tubuh kita akan terseleksi dengan baik oleh sistem tubuh kita, sehingga akan melahirkan out put berupa kualitas penampilan diri dalam hal berperilaku, cara berpikir, watak serta karakter yang baik sehingga tidak merugikan orang lain. Sebaliknya, jika sistem dalam tubuh kita jelek, maka sudah pasti input yang masuk ke dalamnya pada akhirnya akan memproduksi sifat-sifat buruk yang melekat dalam diri kita, sehingga out put berupa tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sudah pasti akan merugikan orang lain. Demikian pula dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, jika sistem yang kita bangun di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, agama dan lain sebagainya dalam sebuah negara yang ibaratnya seperti tubuh tadi, semuanya

jelek, maka manusia-manusia sebagai input yang masuk ke dalam sistem bernegara tersebut, akan keluar sebagai sosok makhluk "*homo homuni lupus*", sehingga sudah pasti pula akan merugikan orang lain dan pada akhirnya akan memicu pertentangan dan konflik dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang ekonomi misalnya, karena sistem ekonomi yang pernah dibangun oleh penguasa orde baru yang lebih berpihak pada konglomerat dengan memberikan hak-hak monopoli yang begitu besar kepada mereka, pada akhirnya telah melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang rakus, sehingga mematikan pelaku-pelaku ekonomi lemah. Demikian pula di bidang politik, berlakunya *spoil system* yang dipraktekkan di lembaga birokrasi dengan corak patrimonial, mengakibatkan lembaga birokrasi dipenuhi oleh manusia-manusia yang tidak ber-

kualitas, kecuali ABS (Asal Bapak Senang) dan cenderung menjadi sumber Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Pendek kata, sistem pemerintahan sentralisasi yang dipraktekkan selama 30 tahun lamanya, yang diikuti oleh mengalirnya sumber-sumber daya ekonomi dari daerah-daerah ke pusat, telah memunculkan apa yang disebut sebagai *poverty amidst plenty*. Kesemuanya itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar-kawasan di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai konsekuensi dari sistem yang jelek tersebut maka yang kita rasakan saat ini, adalah sebuah kehidupan berbangsa yang dipenuhi oleh konflik, baik konflik horizontal maupun vertikal.

Dengan demikian, upaya meminimalkan terjadinya konflik bertolak dari pendekatan sistem yang dikemukakan di atas, dapat digambarkan sebagai berikut :



Jelasnya, kalau sistemnya baik maka out put berupa tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di berbagai aspek kehidupan akan mampu meminimalisir intensitas konflik. Sebaliknya kalau sistemnya rusak sehingga mengakibatkan terjadinya praktek-praktek ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka potensi konflik dalam masyarakat akan semakin membesar.

## PENUTUP

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan, bahwa realitas sosial tentang konflik memiliki akar penyebab yang bersifat internal yakni dari manusia itu sendiri manakala sistem yang dibangun dalam hubungannya dengan ke-

hidupan dalam berbagai aspek eksternal seperti di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya tidak memberikan rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Sementara upaya untuk menghilangkan konflik dari peradaban kehidupan manusia di muka bumi ini, adalah sebuah mitos belaka. Namun yang dapat dilakukan hanyalah sebatas upaya untuk memperkecil kuantitas dan kualitas konflik dengan cara meminimalisir faktor-faktor penyebab terjadinya konflik yaitu melalui penciptaan sebuah sistem yang baik secara internal maupun secara eksternal dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mencegah bangkitnya naluri serakah manusia.

## DAFTAR ISI

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

- Dahrendorf, Ralf., 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Rajawali, Jakarta.
- Das, Veena, et.all., 2000. *Violence and Subjectivity*. University of California Press, Los Angeles.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Gurr, Ted, Robert., 1970. *Why Men Rebel*. Princenton University Press. New Jersey.
- Geertz, Clifford., 1976. *Ikatan-ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara-negara Baru*. Gramedia, Jakarta.
- Huntington, Samuel P., 1968. *Political Order in Changing Society*. Yale University Press.

- Paige, Jeffrey M., 1975. *Agrarian revolution: Social Movement and Export Agriculture in The Underdeveloped World*. The Free Press, New York.
- Ritzer, George., 1983. *Sociological Theory*. Alfred A. Knopf, New York.
- Santoso, Thomas, (ed.) 2002. *Teori-teori Kekerasan*. Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, Indonesia.
- Scott, James, C., 1989. *Weapons of The Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven Yale University Press, London.
- Wisband, Edwar (ed)., 1989. *Poverty Amidst Plenty. World Political Economy and Distributive Justice*. Westview Press, London.
- Wolf, Eric., 1969. *Peasant Wars of The Twentieth Century*. Harper & Row Publisher, New York.
- Woodhouse, Tom, dkk., 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

